



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor..... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

α

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 64.928.277.000 (enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 61.681.863.150,- (enam puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

X

- b. Alokasi formula sebesar Rp. 3.246.413.850,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan

keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

- 1). Rumus Penetapan ADD:

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP.)$$

- ADDx = Alokasi Dana Desa x
 ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 95%.
 ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 5%).

- 2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$ADD = (ADDM + BDx (ADDP.))$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

- 3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4$$

- a1, a2, a3, a4 :adalah angka bobot masing-masing variabel
 KV1, KV2, KV3, KV4 :adalah koefisien masing-masing variabel.

- a. Rumus koefisien Variabel Desa x

- 1) KV Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Desa

Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab

- 2) KV JumlahPenduduk

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Desa seKab.

- 3). KV. Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa

Jumlah Luas Wilayah Desa seKab

α

4). KV Keterjangkauan Desa

Jarak Desa keKab

Jumlah Jarak Desa keKab.

b. Penetapan Variabel Dan BobotVariabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
- 2) Data JumlahPenduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat.
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistikdata BPS/Kabupaten/Kecamatan.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalahJarak Desa keKabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2

Pasal 6

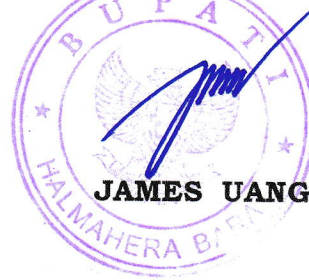
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Januari 2025

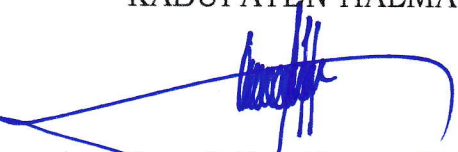
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 16 Januari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


Drs. Julius Marau, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina IV/a

Nip. 19730128 2006 04 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025
TENTANG : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total ADD 2025/ Desa	Nilai ADD Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)	
1	Jailolo	Gufasa	356.542.561,561	11.544.351	368.086.913	368.087.000
2	Jailolo	Guaimaadu	356.542.561,561	16.551.219	373.093.781	373.094.000
3	Jailolo	Jalan Baru	356.542.561,561	30.257.048	386.799.610	386.800.000
4	Jailolo	Gam Lamo	356.542.561,561	18.578.537	375.121.099	375.121.000
5	Jailolo	Soakonora	356.542.561,561	20.555.454	377.098.015	377.098.000
6	Jailolo	Galala	356.542.561,561	18.061.343	374.603.905	374.604.000
7	Jailolo	Bobanehena	356.542.561,561	19.733.158	376.275.720	376.276.000
8	Jailolo	Payo	356.542.561,561	12.581.383	369.123.945	369.124.000
9	Jailolo	Bobo	356.542.561,561	16.768.172	373.310.734	373.311.000
10	Jailolo	Saria	356.542.561,561	9.195.791	365.738.353	365.738.000
11	Jailolo	Idam Dehe	356.542.561,561	8.379.170	364.921.732	364.922.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	356.542.561,561	8.755.885	365.298.447	365.298.000
13	Jailolo	Marmabati	356.542.561,561	11.112.405	367.654.967	367.655.000
14	Jailolo	Gamtala	356.542.561,561	11.185.361	367.727.922	367.728.000
15	Jailolo	Lolory	356.542.561,561	11.865.541	368.408.103	368.408.000
16	Jailolo	Toboso	356.542.561,561	10.380.533	366.923.095	366.923.000
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	356.542.561,561	15.208.249	371.750.810	371.751.000
18	Jailolo	Acango	356.542.561,561	12.502.542	369.045.103	369.045.000
19	Jailolo	Tedeng	356.542.561,561	37.573.928	394.116.489	394.116.000
20	Jailolo	Akediri	356.542.561,561	25.539.451	382.082.013	382.082.000
21	Jailolo	Pornity	356.542.561,561	21.502.323	378.044.885	378.045.000
22	Jailolo	Buku Matiti	356.542.561,561	23.912.281	380.454.843	380.455.000
23	Jailolo	Todowongi	356.542.561,561	19.370.656	375.913.218	375.913.000
24	Jailolo	Tuada	356.542.561,561	14.830.493	371.373.055	371.373.000
25	Jailolo	Matui	356.542.561,561	10.455.312	366.997.874	366.998.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	356.542.561,561	12.945.976	369.488.538	369.489.000
27	Jailolo	Tauro	356.542.561,561	26.456.572	382.999.133	382.999.000
28	Jailolo	Hate Bicara	356.542.561,561	11.888.984	368.431.545	368.432.000
29	Jailolo	Guaeria	356.542.561,561	12.795.109	369.337.671	369.338.000
30	Jailolo	Pateng	356.542.561,561	14.491.140	371.033.701	371.034.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	356.542.561,561	7.672.765	364.215.327	364.215.000
32	Jailolo	Ulo	356.542.561,561	9.512.472	366.055.033	366.055.000
33	Jailolo	Kuripasai	356.542.561,561	12.888.600	369.431.161	369.431.000
34	Jailolo	Buku Maadu	356.542.561,561	9.538.299	366.080.860	366.081.000
35	Loloda	Kedi	356.542.561,561	27.186.930	383.729.491	383.729.000
36	Loloda	Soasio	356.542.561,561	20.746.544	377.289.106	377.289.000
37	Loloda	Totala	356.542.561,561	22.145.729	378.688.290	378.688.000
38	Loloda	Tolofuo	356.542.561,561	16.410.896	372.953.457	372.953.000
39	Loloda	Tuguis	356.542.561,561	24.555.278	381.097.840	381.098.000
40	Loloda	Tasye	356.542.561,561	62.240.630	418.783.191	418.783.000
41	Loloda	Labu Besar	356.542.561,561	25.295.050	381.837.611	381.838.000
42	Loloda	Labu Kecil	356.542.561,561	16.085.088	372.627.650	372.628.000
43	Loloda	Bakun	356.542.561,561	15.822.202	372.364.764	372.365.000
44	Loloda	Buo	356.542.561,561	37.811.475	394.354.037	394.354.000
45	Loloda	Kahatola	356.542.561,561	25.491.050	382.033.612	382.034.000
46	Loloda	Bosala	356.542.561,561	25.345.109	381.887.671	381.888.000
47	Loloda	Salu	356.542.561,561	28.902.160	385.444.722	385.445.000
48	Loloda	Bantoli	356.542.561,561	24.464.314	381.006.876	381.007.000
49	Loloda	Linggua	356.542.561,561	24.005.446	380.548.008	380.548.000
50	Loloda	Tomodo	356.542.561,561	28.174.342	384.716.904	384.717.000
51	Loloda	Totala Jaya	356.542.561,561	14.681.726	371.224.288	371.224.000
52	Loloda Tengah	Jano	356.542.561,561	11.970.956	368.513.517	368.514.000
53	Loloda Tengah	Bakun Pante	356.542.561,561	18.845.560	375.388.122	375.388.000
54	Loloda Tengah	Barataku	356.542.561,561	32.206.896	388.749.458	388.749.000
55	Loloda Tengah	Gam Kahe	356.542.561,561	24.482.393	381.024.955	381.025.000
56	Loloda Tengah	Pumadada	356.542.561,561	59.745.957	416.288.518	416.289.000
57	Loloda Tengah	Baja	356.542.561,561	17.513.619	374.056.181	374.056.000
58	Loloda Tengah	Tosomolo	356.542.561,561	14.524.286	371.066.847	371.067.000
59	Loloda Tengah	Jangailulu	356.542.561,561	11.991.504	368.534.066	368.534.000
60	Loloda Tengah	Bilote	356.542.561,561	16.941.319	373.483.881	373.484.000
61	Loloda Tengah	Aruku	356.542.561,561	15.023.950	371.566.512	371.567.000
62	Ibu	Togola Wayoli	356.542.561,561	15.853.711	372.396.273	372.396.000
63	Ibu	Togola Sangir	356.542.561,561	23.266.442	379.809.003	379.809.000
64	Ibu	Tahafo	356.542.561,561	15.807.451	372.350.013	372.350.000
65	Ibu	Tongute Ternate	356.542.561,561	30.657.652	387.200.214	387.200.000
66	Ibu	Akesibu	356.542.561,561	19.269.198	375.811.759	375.812.000
67	Ibu	Maritango	356.542.561,561	16.343.443	372.886.004	372.886.000

68	Ibu	Kie Ici	356.542.561,561	29.208.784	385.751.346	385.751.000
69	Ibu	Tongute Goin	356.542.561,561	25.976.442	382.519.003	382.519.000
70	Ibu	Tungute Sungi	356.542.561,561	15.856.943	372.399.505	372.400.000
71	Ibu	Gam Ici	356.542.561,561	22.489.269	379.031.831	379.032.000
72	Ibu	Tobaol	356.542.561,561	20.223.220	376.765.781	376.766.000
73	Ibu	Gamlamo	356.542.561,561	20.127.724	376.670.286	376.670.000
74	Ibu	Naga	356.542.561,561	19.172.843	375.715.404	375.715.000
75	Ibu	Soana Masungi	356.542.561,561	16.994.108	373.536.669	373.537.000
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	356.542.561,561	12.276.426	368.818.988	368.819.000
77	Ibu	Ake Boso	356.542.561,561	15.230.756	371.773.317	371.773.000
78	Ibu	Kampung Baru	356.542.561,561	13.524.657	370.067.219	370.067.000
79	Sahu	Susupu	356.542.561,561	14.240.361	370.782.923	370.781.000
80	Sahu	Lako Akelamo	356.542.561,561	7.102.666	363.645.228	363.645.000
81	Sahu	Taruba	356.542.561,561	7.746.126	364.288.687	364.289.000
82	Sahu	Todahe	356.542.561,561	9.947.798	366.490.360	366.490.000
83	Sahu	Peot	356.542.561,561	15.619.214	372.161.775	372.162.000
84	Sahu	Sasur	356.542.561,561	26.257.089	382.799.651	382.800.000
85	Sahu	Goro goro	356.542.561,561	18.955.534	375.498.096	375.498.000
86	Sahu	Tacim	356.542.561,561	9.489.444	366.032.006	366.032.000
87	Sahu	Balisoang	356.542.561,561	11.157.309	367.699.870	367.700.000
88	Sahu	Worat-worat	356.542.561,561	6.388.534	362.931.096	362.931.000
89	Sahu	Tacici	356.542.561,561	5.445.457	361.988.019	361.988.000
90	Sahu	Taraudu	356.542.561,561	6.996.220	363.538.781	363.539.000
91	Sahu	Golo	356.542.561,561	7.666.324	364.208.886	364.209.000
92	Sahu	Lako Akederi	356.542.561,561	8.067.193	364.609.755	364.610.000
93	Sahu	Jara Kore	356.542.561,561	9.151.324	365.693.886	365.694.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	356.542.561,561	15.549.761	372.092.322	372.092.000
95	Sahu	Dere	356.542.561,561	11.592.024	368.134.586	368.135.000
96	Sahu	Balisoan Utara	356.542.561,561	10.946.471	367.489.033	367.489.000
97	Sahu	Sasur Pantai	356.542.561,561	9.390.330	365.932.891	365.933.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	356.542.561,561	42.625.863	399.168.425	399.168.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	356.542.561,561	31.499.819	388.042.381	388.042.000
100	Jailolo Selatan	Domato	356.542.561,561	20.835.781	377.378.342	377.378.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	356.542.561,561	16.925.994	373.468.556	373.469.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	356.542.561,561	13.972.458	370.515.020	370.515.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	356.542.561,561	12.096.431	368.638.993	368.639.000
104	Jailolo Selatan	Biamaahi	356.542.561,561	17.072.666	373.615.228	373.615.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	356.542.561,561	15.419.278	371.961.840	371.962.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	356.542.561,561	48.039.074	404.581.635	404.582.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	356.542.561,561	17.998.179	374.540.741	374.541.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	356.542.561,561	28.642.941	385.185.503	385.186.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	356.542.561,561	16.973.198	373.515.759	373.516.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	356.542.561,561	25.795.054	382.337.615	382.338.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	356.542.561,561	20.441.103	376.983.664	376.984.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai (DB)	356.542.561,561	22.707.033	379.249.595	379.250.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	356.542.561,561	13.397.362	369.939.924	369.940.000
114	Jailolo Selatan	Braha	356.542.561,561	19.943.918	376.486.480	376.486.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	356.542.561,561	14.307.954	370.850.516	370.851.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	356.542.561,561	8.420.491	364.963.052	364.963.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	356.542.561,561	14.744.699	371.287.261	371.287.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	356.542.561,561	15.959.656	372.502.218	372.502.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	356.542.561,561	6.498.864	363.041.426	363.041.000
120	Jailolo Selatan	Bobaneigo Madihutu	356.542.561,561	30.374.758	386.917.320	386.917.000
121	Jailolo Selatan	Akelamo Cinga-cinga	356.542.561,561	25.560.927	382.103.489	382.103.000
122	Jailolo Selatan	Akesahu Madutu	356.542.561,561	22.310.690	378.853.252	378.853.000
123	Jailolo Selatan	Tetewang Joronga	356.542.561,561	13.584.683	370.127.244	370.127.000
124	Tabaru	Podol	356.542.561,561	31.124.475	387.667.036	387.667.000
125	Tabaru	Tengowango	356.542.561,561	13.086.707	369.629.269	369.629.000
126	Tabaru	Togowo	356.542.561,561	57.316.149	413.858.711	413.859.000
127	Tabaru	Duono	356.542.561,561	29.920.858	386.463.420	386.463.000
128	Tabaru	Goin	356.542.561,561	18.740.350	375.282.911	375.283.000
129	Tabaru	Sangaji Nyeku	356.542.561,561	17.719.073	374.261.634	374.262.000
130	Tabaru	Tuguis	356.542.561,561	14.470.178	371.012.740	371.013.000
131	Tabaru	Togoreba Sungi	356.542.561,561	20.792.210	377.334.772	377.335.000
132	Tabaru	Barona	356.542.561,561	45.948.285	402.490.846	402.491.000
133	Tabaru	Todoke	356.542.561,561	13.632.786	370.175.347	370.175.000
134	Tabaru	Tolisaor	356.542.561,561	20.717.351	377.259.913	377.260.000
135	Tabaru	Pasalulu	356.542.561,561	20.426.785	376.969.346	376.969.000
136	Tabaru	Togoreba Tua	356.542.561,561	25.879.931	382.422.493	382.422.000
137	Tabaru	Tukuoku	356.542.561,561	19.113.325	375.655.886	375.656.000
138	Tabaru	Soasangaji	356.542.561,561	8.623.500	365.166.061	365.166.000
139	Tabaru	Aru Jaya	356.542.561,561	18.554.471	375.097.032	375.097.000
140	Ibu Selatan	Tosoa	356.542.561,561	20.652.646	377.195.208	377.195.000
141	Ibu Selatan	Tobobol	356.542.561,561	24.199.893	380.742.454	380.742.000
142	Ibu Selatan	Baru	356.542.561,561	41.301.970	397.844.532	397.845.000
143	Ibu Selatan	Nanas	356.542.561,561	16.135.339	372.677.901	372.678.000
144	Ibu Selatan	Jere	356.542.561,561	20.277.217	376.819.778	376.820.000
145	Ibu Selatan	Gamsungi	356.542.561,561	17.440.515	373.983.076	373.983.000
146	Ibu Selatan	Bataka	356.542.561,561	36.964.614	393.507.176	393.507.000

147	Ibu Selatan	Talaga	356.542.561,561	31.013.306	387.555.867	387.556.000
148	Ibu Selatan	Tobelos	356.542.561,561	13.129.327	369.671.889	369.672.000
149	Ibu Selatan	Gamkonora	356.542.561,561	22.753.891	379.296.453	379.296.000
150	Ibu Selatan	Sarau	356.542.561,561	27.253.115	383.795.676	383.796.000
151	Ibu Selatan	Ngawet	356.542.561,561	27.876.538	384.419.100	384.419.000
152	Ibu Selatan	Adu	356.542.561,561	19.580.341	376.122.903	376.123.000
153	Ibu Selatan	Gamsida	356.542.561,561	25.988.403	382.530.965	382.531.000
154	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	356.542.561,561	15.613.140	372.155.702	372.156.000
155	Ibu Selatan	Tuguaer	356.542.561,561	22.096.208	378.638.770	378.639.000
156	Sahu Timur	Loce	356.542.561,561	16.021.618	372.564.179	372.564.000
157	Sahu Timur	Idam Gamlamo	356.542.561,561	9.772.896	366.315.458	366.315.000
158	Sahu Timur	Gamomeng	356.542.561,561	11.351.271	367.893.833	367.894.000
159	Sahu Timur	Akelamo	356.542.561,561	15.988.070	372.530.632	372.531.000
160	Sahu Timur	Taraudu Kusu	356.542.561,561	7.327.226	363.869.787	363.870.000
161	Sahu Timur	Awer	356.542.561,561	12.480.850	369.023.412	369.023.000
162	Sahu Timur	Aketola	356.542.561,561	13.052.600	369.595.161	369.595.000
163	Sahu Timur	Tibobo	356.542.561,561	11.422.014	367.964.576	367.965.000
164	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	356.542.561,561	8.232.798	364.775.360	364.775.000
165	Sahu Timur	Gamnyial	356.542.561,561	8.917.149	365.459.711	365.460.000
166	Sahu Timur	Golago Kusuma	356.542.561,561	9.571.576	366.114.137	366.114.000
167	Sahu Timur	Ngaon	356.542.561,561	6.483.405	363.025.966	363.026.000
168	Sahu Timur	Gamsungi	356.542.561,561	6.278.413	362.820.974	362.821.000
169	Sahu Timur	Taba Campaka	356.542.561,561	9.488.630	366.031.191	366.031.000
170	Sahu Timur	Campaka	356.542.561,561	11.777.762	368.320.324	368.320.000
171	Sahu Timur	Goal	356.542.561,561	19.854.292	376.396.854	376.397.000
172	Sahu Timur	Sidodadi	356.542.561,561	18.300.489	374.843.051	374.843.000
173	Sahu Timur	Air Panas	356.542.561,561	14.411.849	370.954.411	370.954.000
	Jumlah		61.681.863.150	3.246.413.850	64.928.277.000	64.928.277.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid Pem dan Kesra	
Kepala DPMPD	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Diundangkan Di Jailolo
Pada Tanggal 16 Januari 2025

PJ. SERETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DRS. JULIUS MARAU, M.Si
Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Nomor

Salinan sesuaidengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 Nomor 5

Jason Kalapas Lalomo, S.H., LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 2006 04 1 009